

5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Ketahanan nasional sangat ditentukan sejauh mana masyarakat meyakini dan menghayati ideologi bangsanya sendiri dalam bentuk karya dan langkah nyata bagi negara dan bangsanya sehingga setiap bagian dari bangsa ini, harus ikut andil mencari solusi dalam memantapkan Pancasila di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, beretika dan bermartabat harus senantiasa terus ditumbuh kembangkan di tengah-tengah masyarakat dengan memperkuat demokrasi dan melestarikan nilai-nilai luhur dan jati diri bangsa yang bercirikan semangat gotong royong, saling menghargai, santun dan menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara.

Jawa Tengah meneguhkan diri menjadi Benteng Pancasila bagi bangsa dan Negara Indonesia dari berbagai upaya yang ingin mengganti ideologi bangsa Indonesia. Warga Jawa Tengah memiliki semangat kebersamaan yang tinggi untuk melawan radikalisme dan terorisme yang secara diam-diam menggerogoti keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran serta masyarakat sangat strategis dalam penguatan nilai-nilai kebangsaan, sehingga akan tercipta situasi pembangunan yang kondusif khususnya bagi Provinsi Jawa Tengah.

Antisipasi potensi konflik agar tidak berkembang menjadi konflik sosial, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah diantaranya dengan melakukan pemetaan daerah rawan konflik, deteksi dini, meningkatkan jalinan koordinasi dengan aparat keamanan dan dinas terkait serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menjaga kondusivitas daerah dengan cara mengoptimalkan peran dan fungsi FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat), FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dan forum-forum lainnya yang ada di masyarakat.

Peningkatan pendidikan politik masyarakat telah mempengaruhi perkembangan demokrasi, dengan semakin tinggi pemahaman masyarakat terhadap hak-hak dan kewajiban politiknya, menunjukkan kehidupan demokrasi berkembang dengan baik. Salah satu bentuk perwujudan pelaksanaan demokrasi adalah pemilu yang menjamin penggunaan hak pilih warga Negara. Pemilu sebagai lembaga sekaligus praktik politik dapat menjadi sarana bagi perwujudan kedaulatan rakyat sekaligus sebagai sarana artikulasi kepentingan warga Negara untuk menentukan masa depan pembangunan bangsa.

Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, telah berjalan lancar dan aman. Kalaupun ada kendala, skalanya relative kecil dan tidak berdampak signifikan terhadap hasil Pemilu Tahun 2019 secara keseluruhan. Indikator keberhasilan Pemilu 2019 dapat dilihat dari aspek profesionalitas penyelenggara pemilu, aspek stabilitas keamanan, aspek partisipasi masyarakat, aspek netralitas aparatur pemerintah dan aspek penegakkan hukum.

Gerakan Revolusi Mental yang telah dideklarasikan di Jawa Tengah dengan tujuan untuk memantapkan jati diri warga Jawa Tengah yang bangga terhadap nilai-nilai kearifan lokal dengan mengubah cara pandang, cara pikir dan cara kerja yang berorientasi pada

kemajuan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang kompetitif; membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimis sebagai bangsa Indonesia dengan potensi kekuatan besar yang mampu berprestasi tinggi dan produktif, sehingga menjadi negara maju dan modern; serta mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Provinsi Jawa Tengah yang memiliki semua bentuk bencana telah melakukan upaya penanggulangan bencana yang dilakukan melalui pengurangan risiko bencana sampai dengan tingkat komunitas/masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana dengan meningkatkan kapasitas dari masyarakat selain itu juga dilakukan antara lain, pembentukan desa tangguh bencana, pemasangan Early Warning System (EWS) dan rambu jalur evakuasi, latihan relawan penanggulangan bencana.

Penghargaan tingkat nasional antara lain Provinsi Berpartisipasi Aktif Dalam Penanggulangan Bencana, dan pada event Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB), berhasil merebut 3 (tiga) kejuaraan kebencanaan yaitu Juara 1 Lomba Desk Relawan, Juara 1 Lomba Cerdas Cermat dan Juara 1 Lomba Penulisan Melalui Media Sosial.

a. Realisasi Indikator Kinerja Program

Untuk mewujudkan pembangunan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan melalui 8 program, yaitu Peningkatan Kepatuhan Aparatur, Badan Usaha/Hukum Dan Masyarakat Pada Produk Hukum Daerah; Pemeliharaan Kamtrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal; Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat; Peningkatan Kemampuan Linmas Dan Rakyat Terlatih; Penguatan Ideologi dan Kewaspadaan; Penguatan Ketahanan Bangsa; Penguatan Politik Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Indikator kinerja program yang mendukung urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebanyak 14 indikator, Perincian ketercapaian dari 14 Indikator tersebut disajikan dalam Lampiran Indikator Kinerja Program Urusan Trinbunlinmas L-I.A.1.5.1-3.

Dari Lampiran Lampiran Indikator Kinerja Program Urusan Trinbunlinmas L-I.A.1.5.1-3 dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Program Peningkatan Kepatuhan Aparatur, Badan Usaha/Hukum Dan Masyarakat Pada Produk Hukum Daerah memiliki 1 indikator dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi. 2) Program Pemeliharaan Kamtrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal memiliki 1 indikator dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi. 3) Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat memiliki 2 indikator dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi; 4) Program Peningkatan Kemampuan Linmas Dan Rakyat Terlatih memiliki 1 indikator dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi. 5) Program Penguatan Ideologi dan Kewaspadaan memiliki 3 indikator dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi. 6) Program Penguatan Ketahanan Bangsa memiliki 1 indikator dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi. 7) Program Penguatan Politik Dalam Negeri memiliki 1 indikator dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi, dan 8) Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana memiliki 4 indikator dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi.

Secara keseluruhan, 14 indikator memiliki tingkat ketercapaian sangat tinggi. Uraian berkaitan dengan indikator umum dan tingkat ketercapaiannya disajikan dalam Tabel berikut ini:

No	Nama Program	Jumlah Indikator	Tingkat Ketercapaian				
			Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Program Peningkatan Kepatuhan Aparatur, Badan Usaha/ Hukum Dan Masyarakat Pada Produk Hukum Daerah	1	1	-	-	-	-
2	Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	1	1	-	-	-	-
3	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	2	2	-	-	-	-
4	Peningkatan Kemampuan Linmas Dan Rakyat Terlatih	1	1	-	-	-	-
5	Penguatan Ideologi dan Kewaspadaan	3	3	-	-	-	-
6	Penguatan Ketahanan Bangsa	1	1	-	-	-	-
7	Penguatan Politik Dalam Negeri	1	1	-	-	-	-
8	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	4	4	-	-	-	-
Jumlah		14	14	-	-	-	-

Keterangan:

Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan kategori sebagai berikut:

- 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$
- 2) Tinggi : 76 – 90,99%
- 3) Sedang : 66 – 75,99%
- 4) Rendah : 51 - 65,99%
- 5) Sangat rendah : $\leq 50,99$

Uraian berkenaan dengan pelaksanaan program adalah sebagai berikut :
Program Peningkatan Kepatuhan Aparatur, Badan Usaha/Hukum Dan Masyarakat Pada Produk Hukum Daerah, memiliki 1 indikator dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi, yaitu Persentase penegakkan pelanggaran produk hukum daerah dengan realisasi 100% sesuai target.

Manfaat Program Peningkatan Kepatuhan Aparatur, Badan Usaha/Hukum Dan Masyarakat Pada Produk Hukum Daerah adalah meningkatnya kepatuhan terhadap produk hukum daerah.

Program Pemeliharaan Kamtramtibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal memiliki indikator dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi, yaitu Persentase kabupaten/kota rawan tramtib yang kondusif dengan realisasi 85% sesuai target.

Manfaat dari program Pemeliharaan Kamtramtibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal adalah meningkatnya kondusifitas wilayah di 35 kabupaten/kota.

Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat memiliki 2 indikator dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi, yaitu Persentase anggota Satpol PP Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya dengan realisasi 12,52% sesuai target dan Persentase masyarakat yang meningkat kepatuhan dan ketaatannya terhadap tibumtranmas dengan realisasi 10,7% sesuai target.

Manfaat pelaksanaan program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat meningkatnya pemahaman masyarakat dalam hal ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Program Peningkatan Kemampuan Linmas Dan Rakyat Terlatih memiliki indikator dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi, yaitu Persentase anggota Linmas Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya, dengan realisasi 2,24% belum sesuai target 2,29%. Hal ini disebabkan lebih difokuskan pada kegiatan yang menunjang pelaksanaan Pileg/Pilpres, sehingga akan dilakukan akselerasi pada tahun berikutnya dalam pencapaian target.

Manfaat program Peningkatan Kemampuan Linmas Dan Rakyat Terlatih adalah meningkatnya kemampuan anggota Satlinmas dan Rakyat Terlatih dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Program Penguatan Ideologi dan Kewaspadaan, memiliki 3 indikator kinerja program dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi, yaitu Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan wasbang dengan realisasi 87,8% melebihi dari target 80,00%, Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan dan deteksi dini dengan realisasi 88,73% melebihi dari target 80,00%; dan Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial dengan realisasi 100% sesuai target.

Manfaat Penyelenggaraan Program Penguatan Ideologi dan Kewaspadaan adalah terciptanya stabilitas Jawa Tengah dalam kondisi aman terkendali dengan meningkatnya pemahaman pemuda dan pelajar tentang antisipasi potensi paham terorisme dan radikalisme.

Program Penguatan Ketahanan Bangsa, memiliki indikator dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi, yaitu Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan bangsa dengan realisasi 88,7% melebihi dari target 80%.

Manfaat Penyelenggaraan Program Penguatan Ketahanan Bangsa antara lain terjalannya kerukunan antar umat beragama dan etnisitas, meningkatnya kerjasama antar Ormas dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan serta meningkatnya ketahanan ekonomi yang berbasis kearifan lokal.

Program Penguatan Politik Dalam Negeri, memiliki indikator kinerja dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi, yaitu Persentase masyarakat yang paham terhadap aspek-aspek IDI dengan realisasi 87,49% melebihi dari target 80,00%.

Manfaat Penyelenggaraan Program Penguatan Politik Dalam Negeri antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai hak dipilih dan hak memilih serta meningkatnya kehidupan demokrasi di Jawa Tengah.

Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, memiliki 4 indikator dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi, yaitu Persentase penanganan darurat kebencanaan dengan realisasi 100% sesuai dengan target, Persentase pemenuhan logistik bencana dengan realisasi 100% sesuai target; Persentase penurunan risiko bencana realisasi 2% sesuai target; dan Persentase rehab rekon pasca bencana dengan realisasi 100% sesuai target.

Manfaat Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah meningkatnya kapasitas pemerintah dalam penanganan bencana dan kesiapsiagaan penanganan bencana baik pra maupun pasca.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sejumlah Rp111.293.053.000,00 yang terdistribusi pada Satpol PP, Badan Kesbangpol dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan rincian: **Belanja Tidak Langsung** sejumlah Rp31.663.990.000,00. Sedangkan **Belanja Langsung** sejumlah Rp79.629.063.000,00 untuk membiayai pelaksanaan 8 program dengan realisasi fisik sebesar 99,19% dan keuangan 94,80%.

1) Belanja langsung

Program Peningkatan Kepatuhan Aparatur, Badan Usaha/ Hukum Dan Masyarakat Pada Produk Hukum Daerah, alokasi anggaran Rp2.468.800.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,73%. Kegiatan yang mendukung program tersebut adalah Penindakan Pelanggar Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan keluaran 353 pelanggar ditindak dan 8 kali operasi Penegakan Perda (Gakda) di daerah perbatasan lintas provinsi; Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pelanggar Perda dengan keluaran 1.000 pelanggar Perda terinventarisasi; 200 masyarakat pelanggar Perda yang dibina, 450 masyarakat dan Badan Usaha yang dilakukan pengawasan serta 140 tanda larangan yang dipasang; kegiatan Pemberdayaan PPNS dengan keluaran 85 PPNS di Jateng terfasilitasi; Kegiatan Sosialisasi dan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

dengan keluaran 280 peserta mendapat sosialisasi Barang Kena Cukai Ilegal dan 40 kali operasi Barang Kena Cukai Ilegal.

Program Pemeliharaan Kamtramtibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal, alokasi anggaran Rp2.390.000.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 98,57%. Kegiatan yang mendukung program tersebut adalah kegiatan Pemeliharaan Tramtibum di Jawa Tengah dengan keluaran antara lain 250 orang KST yang diberdayakan, 120 KST yang dibina, 8 kegiatan penertiban PNS, 220 kasi tramtib Kabupaten/Kota dibina; Kegiatan Pengendalian dan Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan keluaran antara lain 70 kali patroli pengendalian tramtibum, 279 kegiatan pengawalan pejabat VVIP, 38 kegiatan pengamanan strategis dan tingkat Provinsi, dan 100% unjuk rasa tertangani; Kegiatan Konsolidasi Penanganan Tramtibum di Jawa Tengah dengan keluaran tersusunnya 1 dokumen rencana kerjasama Gakda dan tibumtranmas dan 30 orang mendapat Konsolidasi Penanganan Tramtibum di Jawa Tengah.

Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat, alokasi anggaran Rp1.075.000.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,16%. Kegiatan yang mendukung program tersebut adalah kegiatan Pembinaan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat terhadap tibumtranmas dengan keluaran 95 unit Pembinaan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat terhadap tibumtranmas, 360 peserta mendapat konsolidasi peningkatan kesadaran masyarakat tentang tibumtranmas; Kegiatan Monitoring dan Pendataan Daerah Rawan Gangguan Tramtib dengan keluaran 1 buku pendataan daerah rawan tramtib, dan 1 buku pemutakhiran peta daerah rawan tramtib; Kegiatan Peningkatan Kapasitas/ Kualitas SDM dengan keluaran 330 aparat Satpol PP mendapatkan bintek Peningkatan Kapasitas/Kualitas SDM Satpol.

Program Peningkatan Kemampuan Linmas Dan Rakyat Terlatih alokasi anggaran Rp8.750.000.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,89%. Kegiatan yang mendukung program tersebut adalah Kegiatan Peningkatan Keterampilan Satlinmas dengan keluaran 420 personil Satlinmas telah mengikuti peningkatan ketrampilan linmas; Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Satlinmas dengan keluaran 1.400 peserta Gelar Pasukan; Kegiatan Orientasi Satlinmas dalam Pengamanan dengan keluaran 3.800 peserta yang mengikuti apel siaga dan 1.200 Satlinma mendapat pelatihan tugas pengamanan.

Program Penguatan Ideologi dan Kewaspadaan, alokasi anggaran sejumlah Rp31.920.263.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 91,19%. Kegiatan yang mendukung program tersebut, antara lain: Kegiatan Penanganan Konflik Sosial dengan keluaran terselesaikannya 128 laporan konflik yang tertangani dan 280 orang yang mengikuti pelatihan penyelesaian konflik sosial; Kegiatan Peningkatan Kapasitas Elemen Masyarakat dalm Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini dengan keluaran terbentuknya 1.100 kader resolusi konflik dan tertanganinya 289 kasus unjuk rasa yang ada di Jawa tengah; Kegiatan Peningkatan Pengamalan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan keluaran terlaksananya kegiatan apel kebangsaan dengan peserta kurang lebih

130.000 orang dan terbentuknya 500 kader bela negara dan terbentuknya 1.100 kader Revolusi Mental.

Program Penguatan Ketahanan Bangsa, alokasi anggaran sejumlah Rp6.010.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 98,35%. Kegiatan yang mendukung program tersebut, antara lain: Kegiatan Penguatan Ketahanan Ekonomi dengan keluaran terkajinya 6 dokumen strategik atas pemetaan/mapping kondisi ketahanan bangsa di Jawa Tengah dan terlaksananya kegiatan peningkatan ketahanan ekonomi berbasis kearifan lokal bagi 7.700 orang; Kegiatan Penguatan Ketahanan Seni budaya dan Etnisitas dengan keluaran terfasilitasinya 49 kelompok kesenian di Jawa Tengah dalam pagelaran seni dan budaya daerah, serta Terlaksananya Fasilitasi Forum Pembauran Bangsa Indonesia bagi 160 orang; Kegiatan Penguatan Toleransi Umat Beragama dan Pemberdayaan Ormas dengan keluaran Terfasilitasinya pemberdayaan ormas dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan bagi 320 orang dan terfasilitasinya Forum Kerukunan Antar Umat Beragama bagi 320 orang.

Program Penguatan Politik Dalam Negeri, alokasi anggaran sejumlah Rp9.085.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 99,59%. Kegiatan yang mendukung program tersebut, antara lain: Kegiatan Penguatan Pendidikan dan Budaya Politik dengan keluaran Terselenggaranya kegiatan sosialisasi penanganan dampak pemilu/pilkada bagi 210 orang serta Terlaksananya Kegiatan Pendidikan Politik yang berdasarkan Pancasila dan UUD'45 bagi 1.800 orang. Kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik dengan keluaran Penguatan Ketahanan Ekonomi dengan hasil Terselenggaranya kegiatan penguatan Peran Politik bagi ormas dan Toma/ Toga bagi 80 orang serta terlaksananya kegiatan pendidikan politik bagi pemilih pemula bagi 1.300 orang.

Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, alokasi anggaran sejumlah Rp17.930.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 96,42% dan keuangan 93,66%. Kegiatan yang mendukung program tersebut, antara lain: Kegiatan Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana dengan keluaran 10 Desa Tangguh Bencana; Kegiatan Pengembangan Alat Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) dan Rambu Informasi Bencana Jawa Tengah dengan keluaran 232 EWS dan rambu yang terpasang; Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam kesiapsiagaan/pra bencana dengan keluaran 850 masyarakat terlatih siaga bencana; kegiatan Evaluasi, Pemantauan, dan Penanganan Darurat Bencana dengan keluaran 2 sarana dan prasarana darurat yang tersedia/disiapkan; kegiatan Penanganan rehabilitasi pasca bencana di Jateng dengan keluaran 100% masyarakat terdampak mendapatkan rehabilitasi; Kegiatan Peningkatan kapasitas logistik dan Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan keluaran 80 dapur umum telah dilaksanakan.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci sebagaimana Lampiran: L-II.A.1.5.1-5.

2) Realisasi Belanja Tidak Langsung (Hibah dan Bansos)

Belanja Hibah pada urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diampu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah berupa Hibah kepada Instansi Pemerintah Pusat dan Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi.

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp10.007.516.000,00 kepada 10 Instansi Vertikal, yaitu kepada Satuan Radar 214; Polda Jateng; Pangkalan TNI AL Cilacap, Semarang dan Tegal; Kodam IV Diponegoro; Komando TNI AU Pangsar Sudirman dan Adi Sumarmo serta KPU Prov Jateng dengan realisasi sebesar Rp9.857.516.000,00 (98,50%). Adapun rincian sebanyak 8 (delapan) instansi sudah pencairan dan 2 (dua) instansi tidak dicairkan karena tidak boleh menerima hibah dalam bentuk uang.

Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi berupa hibah bidang Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp4.440.000.000,00 kepada 63 kelompok/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dengan realisasi sebesar Rp3.920.000.000,00 (88,29%), terdiri dari 55 lembaga sudah pencairan, 7 lembaga tidak dicairkan karena tidak ada proposal, 1 lembaga tidak dicairkan karena sudah pernah menerima hibah Tahun 2018.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD

Terhadap Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada LKPJ Gubernur TA 2018, DPRD Provinsi Jawa Tengah merekomendasikan :

1) Satuan Polisi Pamong Praja

Perlu adanya deteksi dini dan cegah dini melalui peran linmas, sehingga perlu adanya pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi linmas. Berkaitan dengan upaya anggota Satlinmas dalam melakukan deteksi dini dan cegah dini Tahun 2019 yang bertujuan meningkatkan keterampilan dan keahlian para anggota Satlinmas dalam pelaksanaan tugas membantu masyarakat di bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Tindaklanjut pada Tahun 2019 dengan mengalokasikan anggaran Pelatihan ToT bagi 1.750 Satlinmas dalam pengamanan terpadu, deteksi dini, penyelamatan di air & Penanganan bencana alam; Pemberdayaan anggota Satlinmas dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; Pelatihan bagi 1.200 Satlinmas dalam pengamanan Pileg dan Pilpres; Pengembangan sistem informasi kemasyarakatan kelinmasan yang terintegasi di Provinsi, Kabupaten/Kota; Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menganggarkan kegiatan peningkatan kapasitas Satlinmas melalui APBD Kabupaten/ Kota. Alokasi TA 2019 sebesar Rp8.750.000.000,00.

Penanganan anak-anak jalanan secara terpadu antara Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dan Satpol PP Kabupaten/Kota serta melibatkan instansi terkait (TNI, POLRI, DINSOS), selanjutnya pembinaan hasil penjarangan diserahkan kepada DINSOS yang merupakan leading penanganan anjal, dengan kegiatan Pengendalian dan Penanganan Ketentraman dan ketertiban umum pada sub kegiatan operasi pekat lintas Kabupaten/Kota dan cipta kondisi.

2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penanaman nilai-nilai ideologi, wawasan kebangsaan dan nasionalisme kepada masyarakat. Tindaklanjut pada Tahun 2019 dengan melaksanakan kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara; Kegiatan Pendidikan dan Pengembangan Karakter Bangsa/Kader Revolusi Mental; Kegiatan Penguatan dan Pemantapan Ideologi Pancasila/Kader Pancasila; Kegiatan Permasayarakatan dan Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila; Kegiatan Penguatan Rekonsiliasi Elemen Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Wasbang; Kegiatan Peningkatan Pemahaman Kesadaran Nilai-Nilai Sejarah dan Perjuangan Bangsa serta Rakor Penanganan Ideologi Negara dan Monitoring Perkembangan Paham/Ideologi Lain.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Masih adanya pelanggaran produk hukum daerah;
- 2) Kurangnya kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap ketertiban umum dan ketentraman;
- 3) Terjadinya konflik sosial, berkembangnya paham terorisme dan kekerasan mengindikasikan rendahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme masyarakat;
- 4) Berkurangnya tingkat toleransi antar umat beragama dapat berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/ penghayat kepercayaan;
- 5) Belum optimalnya proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi; yang berdampak pada capaian tingkat partisipasi politik masyarakat masih dibawah target nasional;
- 6) Belum seluruh BPBD Kabupaten/ Kota mempunyai dan menyusun Perda tentang Penyelenggaraan PB. 16 Kabupaten/Kota yang mempunyai perda penyelenggaraan PB.

Solusi

- 1) Meningkatkan sinergitas penanganan gangguan pelanggaran produk hukum daerah antara Satpol PP Provinsi, Satpol PP Kabupaten/Kota dan Instansi terkait;
- 2) Mendayagunakan peran edukasi kepada masyarakat dan Badan Hukum dalam mematuhi Peraturan Daerah;
- 3) Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur;
- 4) Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan hingga Kabupaten/Kota sesuai (Amanat Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan);
- 5) Sinergitas Ormas, menjaga Toleransi beragama dan etnisitas; Penguatan GNRM (Gerakan Nasional Revolusi Mental) meliputi 5 (lima) gerakan nasional (Melayani, bersih, tertib, mandiri, bersatu);
- 6) Perlu advokasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan PB di Kabupaten/Kota untuk disusun melalui Perda tentang Penyelenggaraan PB.